

IMPLEMENTASI KONSEP BLUE ECONOMY DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR DI MASA NEW NORMAL

Naufal Rusydy Nurfauzi¹

Universitas Nusaputra

naufal.rusydy_mn18@nusaputra.ac.id

Umar Mansur²

Universitas Nusaputra

umar.mansur@nusaputra.ac.id

Abstrak: Pandemi Covid-19 telah mengguncang tatanan negara di berbagai bidang kehidupan. Sebagai the biggest archipelagic state di dunia, covid-19 memberi dampak negatif terhadap sektor ekonomi kelautan di Indonesia. Fenomena 'Nelayan Miskin di Laut yang Kaya' merupakan salah satu persoalan maritim yang sudah dirasakan nelayan kita sedari dulu. Jika efek covid tidak segera diatasi, maka vicious circle tersebut akan bertambah parah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi konsep blue economy sebagai salah satu alternatif untuk membangun dan memulihkan kondisi perekonomian masyarakat pesisir di masa new normal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sedangkan data diperoleh melalui kajian studi literature dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan jika dampak yang dirasakan oleh masyarakat pesisir dari pandemi diantaranya adalah penurunan harga ikan, melemahnya target pemasaran dari hasil perikanan penurunan jumlah wisatawan, kenaikan harga pakan dan obat-obatan untuk menunjang sarana produksi ikan, serta menurunnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat pesisir.

Kata kunci: *covid-19, blue economy, pembangunan masyarakat pesisir*

Abstract: The Covid-19 pandemic has shaken the country's order in various fields of life. As the largest archipelago country in the world, Covid-19 has had a negative impact on the marine economic sector in Indonesia. The phenomenon of 'Poor Fishermen in a Rich Sea' is one of the maritime problems that our fishermen have had for a long time. If the effects of Covid are not resolved immediately, the vicious circle will get worse. This study aims to review the implementation of the blue economy concept as an alternative to build and improve the economic conditions of coastal communities in the new normal. The method used is descriptive qualitative, while the data is obtained through literature review and documentation. The results of the study show, if the impact felt by coastal communities from the pandemic, including a decrease in fish prices, weakening marketing targets of fishery products, a decrease in the number of tourists, an increase in the price of feed and medicines to support fish production facilities, and a decrease in purchasing power and food security coastal communities.

Keywords: *covid-19, blue economy, development of coastal communities*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia memberi dampak destruktif yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan berbagai sektor lain secara global. Di Indonesia, kemunculan virus corona secara perdana terdeteksi pada Maret 2020. Itu pun setelah mendapat kritik dan guyongan yang panjang dari beberapa pejabat pemerintah. Sikap yang memberi ruang pada stakeholder untuk tidak mawas diri dan abai terhadap efek pandemi yang sesungguhnya.

Meski tidak separah kondisi finansial negara pada tahun 1998, di bidang ekonomi covid-19 telah berhasil mengantar Indonesia pada resesi. Selama tahun 2020, PDB Indonesia turun sekitar 2,19 sampai 5,3% di kuartal II sampai IV [1]. Secara spesifik, pandemi covid-19 juga telah memberi dampak negatif terhadap sektor ekonomi kelautan di negara ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang selanjutnya berganti istilah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), telah mempersempit ruang gerak distribusi barang dan jasa di bidang kelautan [2]. Problem yang serius mengingatkan fakta jika >80% perdagangan internasional bergerak melalui dan di atas laut.

Di bidang sektor pariwisata dan pelayaran, aturan *work from home*, rotasi pegawai, dan pembatasan pengunjung secara langsung telah menurunkan pendapatan masyarakat. Di sektor fishery, kebijakan PSBB telah memangkas durasi dan frekuensi melaut, menurunkan supply and demand hasil tangkap, serta menghambat jadwal dan mobilitas dari produk. Untuk nelayan-nelayan kecil, hal ini mendorong vicious circle yang buruk seperti fenomena 'nelayan miskin di laut yang kaya'.

Untuk meminimalisir efek jangka panjang dari pandemi, penelitian ini bertujuan untuk memberi alternatif kepada pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan tanpa menghiraukan kelestarian dan kesehatan ekologi laut. Dengan demikian, Indonesia bisa mencapai program pembangunan berkelanjutan secara optimal sesuai dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

KAJIAN PUSTAKA

Blue Economy

Pada tahun 2010, melalui buku "*The Blue Economy: 10 years – 100 innovations – 100 million jobs*" Gunter Pauli adalah tokoh pertama yang memperkenalkan istilah ekonomi biru. Konsep ini menerapkan logika ekosistem, yaitu ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Ekonomi biru juga menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas, yang meliputi variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya [3].

Dalam forum IORA 2017, Jusuf Kalla yang menjabat wapres ketika itu menjelaskan jika di dunia ada 3 miliar penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada laut. Namun 40% wilayah laut

terkontaminasi oleh polutan yang diciptakan oleh manusia yang hidup di bumi. Meskipun kegiatan konservasi dan rehabilitasi sudah dilakukan selama bertahun-tahun, namun kerusakan ekosistem meningkat lebih cepat dari proses pemulihannya tersebut. Hal ini tentu menyebabkan dampak yang serius pada kesehatan lingkungan laut dan produktivitas yang bisa diambil manusia

dari wilayah perairan. Masyarakat pesisir dari golongan menengah ke bawah merasakan dampak ekonomi yang buruk dari kondisi ini.

Kerusakan terumbu karang di berbagai wilayah karena aktivitas kapal, polusi dan sampah, pemboman ikan, dan lain-lain secara langsung telah merusak habitat hidup ikan-ikan yang ada di laut. Dalam buku dan laporannya, UNDP bahkan menyebutkan jika kerusakan lingkungan laut menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan masyarakat pesisir dan kemiskinan secara gradual juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah [4].

Ekonomi biru dianggap sebagai jembatan dan jalan keluar terbaik untuk mengatasi masalah lingkungan dan kemiskinan yang biasa terjadi pada masyarakat pesisir. Prinsip-prinsip Blue Economy dirancang untuk menghasilkan pertumbuhan positif pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan [5]. Ekonomi biru biasanya dilandaskan pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif, tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan nasional secara masif [6]. Ekonomi biru juga menekankan prinsip zero waste agar setiap sumber daya yang diambil dari alam bisa dimanfaatkan manusia secara optimal. Jika nelayan mengambil ikan tuna di laut, maka dia harus mengolah semua bagian ikan tanpa terkecuali. Kepala, ekor, daging, tulang, bahkan darah harus diolah sebagai industri hilir yang berkualitas tinggi.

Indonesia mulai melirik konsep ekonomi biru sejak era pemerintah SBY. Tahun 2017, konsep ini mulai fokus dikembangkan karena kesadaran pemerintah terhadap potensi sektor maritim yang besar. Sektor kelautan secara progresif memberi sumbangan 20% terhadap PDB

negara, angka yang akan terus meningkat jika dikelola secara optimal. Pemahaman dan aplikasi *blue economy* di seluruh penjuru Indonesia diharapkan bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pembangunan Masyarakat Pesisir

Secara harfiah masyarakat pesisir merupakan sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dan menghuni wilayah pesisir, memiliki kebudayaan serta membentuk suatu yang khas terkait pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir [7]. Masyarakat pesisir cenderung hidup di daerah dekat garis pantai untuk menunjang keberlangsungan hidupnya.

Setidaknya terdapat dua kemudahan yang dimiliki masyarakat pesisir ketika berada dekat daerah pantai. Pertama, mudahnya akses penangkapan ikan, pengumpulan dan budidaya rumput laut serta kegiatan maritim lain yang menunjang perekonomian masyarakat. Kedua, adanya keterjangkauan terhadap akses MCK (mandi, cuci, dan kakus) dan kemudahan dalam proses pembuangan limbah domestik ke wilayah pantai/laut.

Kemudahan itu ternyata tidak melepaskan masyarakat pesisir dari belenggu kemiskinan dan marjinalisasi [8]. Perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks seperti fluktuasi musim ikan; keterbatasan SDM, modal serta akses; jaringan perdagangan ikan yang eksploratif; serta dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong over fishing dan kerusakan lingkungan laut [9]. Kesenjangan sosial-ekonomi dan ketimpangan pendapatan ini kemudian menjadi masalah krusial yang sulit diatas [10].

Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Indikator yang dipakai dalam upaya peningkatannya adalah (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan [11].

Masa New Normal

Adaptasi kebiasaan baru atau new normal merupakan langkah strategis yang dikeluarkan pemerintah untuk hidup berdampingan dengan virus. Kita tidak bisa terus menerus terjebak dalam rantai covid yang tidak kunjung selesai. Penghentian aktivitas penduduk (seperti *lockdown* atau PSBB) telah mendorong resesi terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu, melanjutkan aktivitas dengan prokes yang ketat adalah jalan damai yang paling mungkin untuk mendorong pemulihan kondisi ekonomi negara.

Di Indonesia, banyak pro-kontra yang muncul ke permukaan karena penerapan *new normal* ini. Sebagian ahli berpendapat jika NKRI belum siap bertransisi ke AKB, disebabkan oleh kurva covid yang tidak kunjung turun ketika itu. AKB bahkan digadang-gadang sebagai pilihan yang cacat, pemerintah dianggap tidak mampu menanggung beban ekonomi secara terus-menerus, sehingga mengorbankan kesehatan penduduk dengan menerapkan *new normal*.

METODOLOGI

Penelitian ini mengkaji mengenai implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di masa pandemic covid-19. Penelitian

menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengembangkan pemahaman mengenai satu atau lebih fenomena, menginterpretasikan realitas yang berhubungan dengan *grounded theory*, dan mengembangkan sensitivitas dari konsep yang sedang dipelajari.

Penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk menunjukkan deskripsi mengenai fenomena alamiah dan fenomena yang tengah direkayasa oleh manusia [12]. Sedangkan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang dibentuk oleh filsafat postpositivisme, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang menganalisis kondisi objek secara alamiah.

Pada penelitian ini, kami mencoba menganalisis dan mengungkapkan fakta mengenai implementasi konsep ekonomi biru dan efeknya terhadap pembangunan masyarakat pesisir setelah penerapan masa new normal di Indonesia. Aplikasi ini diamati dari berbagai aturan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (KEMENKOMARVES) sebagai leading actor yang bertugas di tingkat pusat. Data-data yang sudah dihimpun kemudian diolah dan dianalisis untuk dideskripsikan dalam bentuk kalimat dan gambar. Data-data ini diupayakan mengarah pada pendapat, kepercayaan, persepsi, dan ide dari semua pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya memiliki konstruksi ekonomi kelautan yang tangguh

dan kaya. Namun kenyataan di lapangan justru mengatakan sebaliknya, 53% nelayan kita masih diperkirakan hidup di bawah garis kemiskinan. Terjebak dalam lingkaran setan yang juga mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan keluarga mereka.

Tahun 2017, terhitung ada 2,7jt nelayan kita yang ikut andil memasok 25% penduduk miskin di Indonesia. 97% diantaranya beroperasi dengan kapal-kapal kecil, ukurannya <10 GT. Untuk mencapai kesejahteraan yang mapan dan pembangunan yang optimal, keadaan faktual ini jelas sungguh jauh dari kondisi ideal.

Secara general, kondisi masyarakat pesisir yang cenderung masih terbelakang sebenarnya telah berupaya dientaskan oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Pada regulasi tersebut dijelaskan pemerintah beserta pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberdayakan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraannya [13].

Keberadaan regulasi tersebut bisa diartikan sebagai sebuah upaya serius pemerintah untuk mengeluarkan masyarakat pesisir dari garis kemiskinan. Celakanya, pandemi covid-19 malah memperburuk situasi ini. Beberapa pernyataan berikut menyatakan dampak pandemic dan solusi finansial yang bisa diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan perekonomian laut berdasarkan pertimbangan konsep *blue economy*.

Pertama, penurunan harga ikan. Menurut survei yang sudah dilakukan oleh KNTI, mayoritas nelayan mengadukan

penurunan harga karena demand and supply yang minim dari setiap rantai pelaku ekonomi kelautan [14]. Kejadian yang sama tersebar serentak, dari Banten, Kalimantan, DKI Jakarta, NTT, NTB, Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia.

Dalam kasus ini, blue economy dengan prinsip zero waste bisa diterapkan melalui penetrasi teknologi dan alat-alat mutakhir guna mengawetkan ikan dan mengolahnya menjadi produk lain selain ikan mentah. Penjualan produk primer seperti ini memang harus mulai dikurangi, mengingat hilirisasi industri bisa menaikkan pendapatan nelayan dan meningkatkan PDB

kelautan secara general. Industri pengolahan ikan menjadi kerupuk, keripik, pakan hewan, dan lain-lain bisa memanfaatkan seluruh bagian tubuh ikan tanpa bersisa.

Kedua, melemahnya target pemasaran hasil perikanan. Pengurangan demand sangat terasa di ranah ekspor, banyak negara yang membantalkan dan mengurangi jumlah produk yang mereka pesan dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pembatasan sosial dan *lockdown* yang diterapkan oleh beberapa negara seperti USA dan Tiongkok. Bahkan sebanyak 26.675 RTP (Rumah Tangga Perikanan) harus terdampak karena hal ini.

Untuk mengatasinya, pemerintah kemudian menggalakkan kembali program GEMAR IKAN untuk menstimulus pergerakan ekonomi perikanan di dalam negeri. Secara historis, kita tidak bisa mengelak. Sebagai negara maritime, Indonesia memang agak sedikit aneh karena tidak menjadikan ikan sebagai bahan pangan utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk. Alih-alih membeli ikan segar, harga yang murah

berhasil mendorong masyarakat kita untuk mengkonsumsi ikan asin dengan kualitas yang buruk dan nilai gizi yang rendah.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dengan visi Poros Maritim Dunia harus kembali berupaya untuk menguatkan budaya bahari di seluruh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, tidak hanya gerakan makan ikan yang akan popular, namun gerakan untuk ‘kembali ke laut’ sebenarnya bisa membuka gerbang ekonomi yang lebih progresif dari yang sudah kita miliki saat ini.

Ketiga, penurunan jumlah wisatawan. Meskipun berdampak negatif secara ekonomi, penurunan jumlah turis sebenarnya memberi waktu kepada alam untuk melakukan pemulihan terhadap kesehatan ekologinya. Dalam konsep *blue economy*, kedua faktor itu harus dijalankan secara seimbang. Di fase istirahat ini, masyarakat dan pemerintah terkait bisa merangkai rencana untuk melakukan penjualan wisata secara global. Pembuatan *website* dan promosi daring bisa disiapkan selama pandemi, memanfaatkan lokasi wisata yang lengang dan bersih. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *blue economy* untuk memaksimalkan inovasi dan teknologi informasi dalam setiap sektor ekonomi laut.

Keempat, kenaikan harga pakan dan obat-obatan untuk menunjang sarana produksi ikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bisa melakukan injeksi bantuan berupa uang dan barang untuk memulihkan daya beli dan daya produksi para nelayan kecil. Pemerintah juga bisa mempermudah upaya kredit, sedangkan pelaku budidaya bisa melakukan kegiatan panen secara berkala untuk mengontrol harga di pasar ikan. Proses penjualan juga bisa didukung dengan bantuan aplikasi *e-commerce* dan media sosial lainnya.

Kelima, menurunnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat pesisir. Meski pandemi, nelayan-nelayan di beberapa wilayah tetap berupaya melaut untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah mereka. Di Jawa Timur, untuk durasi 15-20 hari melaut, pendapatan nelayan menurun dari Rp3-5jt ke angka Rp1-1,5jt. Untuk mencegah persebaran virus, pemerintah bisa membantu menyokong ketersediaan masker, *hand sanitizer*, dan produk kesehatan lainnya.

KKP juga telah melakukan upaya untuk membeli sebagian produk perikanan yang dihasilkan oleh nelayan dan menyimpannya dalam *cold storage* yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dengan strategi ini, diharapkan rantai pasok bisa berjalan dan daya beli masyarakat pesisir juga meningkat. Kerjasama lintas sektoral juga harus dikuatkan guna mendukung pemulihan ekonomi maritim yang lebih cepat.

Secara regional, pemerintah daerah juga bisa membuat proyek pengembangan produksi massal terhadap produk-produk yang bersifat *multiflyer effect*. Penetapan wilayah konservasi salah satunya. Di Aceh, penetapan wilayah konservasi secara simultan memberikan efek positif terhadap perekonomian dan mampu menekan laju destructive fishing disana. Pemandangan bawah lautnya kemudian dimanfaatkan sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha *resort*, *scuba diving*, *snorkeling*, dan lain-lain [15].

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan jika Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengaplikasikan konsep *blue economy* di

dalam sektor ekonomi kelautannya. Implementasi ini diharapkan bisa memberikan efek positif terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemic, di masa adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Secara faktual, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, masyarakat pesisir di Indonesia merasakan dampak yang signifikan dari pandemi. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah penurunan harga ikan, penurunan jumlah wisatawan, kenaikan harga pakan dan obat-obatan untuk

menunjang sarana produksi ikan, menurunnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat pesisir, dan melemahnya target pemasaran dari hasil perikanan.

Untuk mengatasi hal ini, maka beberapa solusi yang sudah penulis tawarkan diantaranya adalah:

1. Kegiatan panen bertahap guna mengontrol harga dan penerapan zero waste dalam hilirisasi industri perikanan.
2. Proses digitalisasi pemasaran produk perikanan, melalui aplikasi e-commerce atau media sosial lainnya.
3. Injeksi bantuan barang dan modal kepada nelayan-nelayan kecil.
4. Pembelian produk oleh negara, vaksin, dan pemberian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh penduduk.
5. Penerapan budaya bahari untuk menstimulus perekonomian laut di dalam negeri.

REFERENSI

- [1] Hairunnisa, "PERANAN EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF RESESI EKONOMI GLOBAL 2020," *J. Al-Iqtsihad J. Eknomi Syariah*, vol. 2, no. 01, pp. 1–13, 2020.
- [2] D. Mardhia, N. Kautsari, L. I. Syaputra, W. Ramdhani, and C. O. Rasiardhi, "PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP HARGA KOMODITAS PERIKANAN DAN AKTIVITAS PENANGKAPAN," *Indones. J. Appl. Sci. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 80–87, 2020.
- [3] Y. Fitria, M. R. Linda, H. A. Mesta, and A. Tasman, "PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN USAHA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INCOME GENERATING BAGI MASYARAKAT NELAYAN," *J. Community Serv.*, vol. 2, no. 2, pp. 76–85, 2020.
- [4] S. Chen and C. De Bruyne, "Blue Economy : Community Case Studies Addressing the Poverty – Environment Nexus in Ocean and Coastal Management," *Sustainability*, vol. 12, pp. 1–18, 2020.
- [5] M. S. Andersen, "An introductory note on the environmental economics of the circular economy," *Sustain Sci*, vol. 2, pp. 133–140, 2007, doi: 10.1007/s11625-006-0013-6.
- [6] A. Zamroni and C. Mirwantini, "PELUANG PENERAPAN KONSEP BLUE ECONOMY PADA USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR," *Bul. Ilm. Sos. Ekon. Kelaut. dan Perikan.*, vol. 4, no. 2, pp. 39–44, 2018.

- [7] I. Indarti and Y. Kuntari, "MODEL PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT PESISIR MELALUI RE-ENGINEERING EKONOMI BERBASIS KOPERASI BERKELANJUTAN," *Pros. Semin. Nas. Multidisiplin Ilmu*, pp. 978–979.
- [8] D. Fatmasari, "ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT PESISIR DESA WARUDUWUR, KECAMATAN MUNDU, KABUPATEN CIREBON," *J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 144–166, 2016.
- [9] Yonvitner, M. Boer, and V. Ardelia, "A Multi-Criteria Approach and Sustainability Index as a Consideration on Torpedo scad Fisheries Management in Sunda Strait," *J. Ilm. Perikan. dan Kelaut.*, vol. 12, no. 1, pp. 48–58, 2020.
- [10] E. Sugiharto, "TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA BENUA BARU ILIR BERDASARKAN INDIKATOR BADAN PUSAT STATISTIK," *EPP*, vol. 4, no. 2, pp. 32–36, 2007.
- [11] A. Imron and M. Syafa, "Revitalisasi Home Industry Berbasis Modal Sosial Sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi Menghadapi Pandemi Covid-19," *Pros. Semin. Nas. Probl. Sos.*, pp. 97–101, 2020.
- [12] M. Linarwati, A. Fathoni, and M. Minarsih, "STUDI DESKRIPTIF PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA SERTA PENGGUNAAN METODE BEHAVIORAL EVENT INTERVIEW DALAM MEREKRUT KARYAWAN BARU DI BANK MEGA CABANG KUDUS," *J. Manage.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, 2016.
- [13] M. H. Makagingge, M. Mantiri, and J. Kairupan, "PEMBERDAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA MAHUMU DUA KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE," *J. Eksek.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2017.
- [14] A. Hamzah *et al.*, "STRATEGI ADAPTASI NELAYAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU," *J. Akuatika Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 25–30, 2021.
- [15] Zalikha, "Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang," *J. Al-Bayan*, vol. 22, no. 31, pp. 90–107, 2015.